BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEBIJAKAN MONETER

TRIWULAN II 2026

PRAKATA

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang terefleksi dalam inflasi yang stabil, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Target inflasi tahun 2026 ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, yaitu sebesar 2,5±1%. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, melalui upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, serta cadangan devisa negara yang cukup. Sesuai dengan bidang tugasnya, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Laporan Kebijakan Moneter (LKM) dipublikasikan oleh Bank Indonesia secara periodik setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi kondisi moneter terkini atas asesmen dan prakiraan perekonomian Indonesia, serta respons kebijakan moneter Bank Indonesia. Secara lebih rinci, dalam publikasi LKM disampaikan hasil evaluasi atas dinamika perekonomian global dan domestik terkini, serta respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Dewan Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur

DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

RICKY PERDANA GOZALI
Deputi Gubernur

THOMAS A.M. DJIWANDONO
Deputi Gubernur

Daftar Isi

PRAKATA iii

Dewan Gubernur iii

Daftar Isi iv

Ringkasan Eksekutif 1

1. Perekonomian Global dan Domestik 3

2. Prospek Perekonomian 7

3. Respons Kebijakan Bank Indonesia 9

Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian global kembali meningkat pasca re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026. Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury naik tinggi ke level 4,56% (tenor 10 tahun) dan 4,18% (tenor 2 tahun) pada tanggal 20 Juli 2026. Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara *Emerging Markets* beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*) sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang kembali meningkat tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik ditopang oleh permintaan domestik. Perkembangan pada triwulan II 2026 menunjukkan konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi ditopang berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja Pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong berbagai stimulus Pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional. Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan. Secara sektoral, pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan tetap baik sejalan dengan realisasi program-program Pemerintah. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi berbagai instrumen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi ketidakpastian global terhadap sistem keuangan. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Prospek perekonomian global tetap lemah dengan tekanan inflasi global yang meningkat. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan naik lebih awal ke triwulan IV 2026. Imbal hasil (*yield*) US Treasury juga diprakirakan meningkat lagi didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS.

Prospek ekonomi domestik tetap baik didukung oleh implementasi berbagai program prioritas Pemerintah untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dalam kisaran 4,9–5,7%. Dari eksternal, Bank Indonesia memprakirakan kinerja transaksi berjalan 2026 tetap sehat dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia melalui berbagai penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Inflasi pada 2026 dan 2027 diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% didukung respons bauran kebijakan moneter Bank Indonesia yang terus diperkuat serta sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai upaya penguatan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan dan perekonomian akan terus ditempuh sehingga dapat menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan kredit sampai dengan Juni 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,75% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah (*"pro-stability"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

BAB 1

Perekonomian Global dan Domestik

Re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026 kembali meningkatkan ketidakpastian global. Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury naik tinggi ke level 4,56% (tenor 10 tahun) dan 4,18% (tenor 2 tahun) pada tanggal 20 Juli 2026. Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara *Emerging Markets* beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*) sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang kembali meningkat tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik ditopang oleh permintaan domestik. Perkembangan pada triwulan II 2026 menunjukkan konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi ditopang berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja Pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong berbagai stimulus Pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional. Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan.

Dari eksternal, kinerja ekspor perlu terus diperkuat guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Secara sektoral, pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan tetap baik sejalan dengan realisasi program-program Pemerintah.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Mei 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS, dengan perkembangan pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Dari transaksi modal dan finansial, berbagai penguatan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik dapat mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Aliran investasi portofolio asing pada triwulan II 2026 mencatat *net inflows* sebesar 8,5 miliar dolar AS terutama didukung Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang kemudian berlanjut pada triwulan III 2026 (hingga 20 Juli 2026) terutama dari SBN yang mencatat *net inflows* sebesar 0,1 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi berbagai instrumen. Rupiah kembali menguat ke Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli 2026, setelah sempat melemah sejak akhir Juni 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan FFR. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS relatif stabil dibandingkan dengan level akhir Juni 2026 sebesar Rp17.880. Guna tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan intervensi baik di pasar NDF luar negeri (*off-shore*) maupun transaksi *spot* dan DNDF di pasar dalam negeri. Suku bunga SRBI dinaikkan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden di SRBI meningkat dari Rp238,09 triliun pada 15 Juni 2026 menjadi Rp288,65 triliun (27,11% dari total posisi SRBI) pada 20 Juli 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memberikan insentif penurunan tingkat *swap* lindung nilai *(hedging swap)* sebesar 10% bagi investor asing guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Bank Indonesia juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen *spot* dan *swap* dalam valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah sejalan dengan meluasnya penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transaction*, LCT) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Inflasi IHK pada Juni 2026 tercatat 3,34% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,08% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,76% (yoy) didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) naik menjadi sebesar 3,42% (yoy) seiring penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 5,58% (yoy) disumbang terutama oleh inflasi komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus membuka *window* lelang instrumen *repurchase agreement* (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan, dan membeli SBN yang pada 2026 (hingga 21 Juli 2026) mencapai Rp188,68 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp76,62 triliun. Langkah tersebut menjaga uang primer (M0) pada Juni 2026 tetap tumbuh tinggi (*double digit*) sebesar 14,1% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh uang kartal yang tumbuh sebesar 14,0% (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 12,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 dipengaruhi oleh operasi moneter Bank Indonesia dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah, termasuk penempatan dana Pemerintah ke perbankan. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh sebesar 10,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,2% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp431,9 triliun dengan alokasi pada *lending channel* sebesar Rp369,0 triliun serta *interest rate channel* sebesar Rp62,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, BUSN sebesar Rp172,5 triliun, BPD sebesar Rp31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,1 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 12,67% (yoy), meningkat dari pertumbuhan Mei 2026 sebesar 11,51% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Juni 2026 masing-masing tumbuh sebesar 24,90% (yoy), 8,94% (yoy), dan 5,75% (yoy). Fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit *(lending appetite)* juga masih longgar serta didukung pertumbuhan DPK yang tetap tinggi yaitu mencapai sebesar 10,21% (yoy). Selain itu, perkembangan suku bunga perbankan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit, termasuk didukung publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Perkembangan suku bunga deposito 1 bulan pada Juni 2026 tercatat 4,76%, sementara suku bunga kredit per Juni 2026 tercatat sebesar 8,81%.

Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi ketidakpastian global terhadap sistem keuangan. Kondisi ini ditandai kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, risiko kredit yang terjaga rendah, dan likuiditas perbankan secara industri juga tetap memadai. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada Mei 2026 tercatat tinggi sebesar 23,74%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17% (bruto) dan 0,84% (neto) pada Mei 2026. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) industri perbankan tercatat sebesar 23,08% pada Juni 2026 atau turun dari sebesar 24,74% pada Mei 2026. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah yang ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Volume transaksi pembayaran digital[1] mencapai 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88% (yoy) pada triwulan II 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan aplikasi *mobile* masing-masing tumbuh sebesar 16,88% (yoy) dan 31,39% (yoy) termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 100,12% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja QRIS yang positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau tumbuh 38,09% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.777 triliun pada triwulan II 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,63 juta transaksi atau tumbuh 13,03% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 12,66% (yoy) mencapai Rp53.492 triliun pada triwulan II 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,03% (yoy) menjadi Rp1.315 triliun pada triwulan II 2026.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, antara lain

[1] Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet.

melalui upaya untuk memastikan pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama memenuhi aspek manajemen risiko dan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

BAB 2

Prospek Perekonomian

Prospek perekonomian global tetap lemah akibat perang di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. FFR diperkirakan naik lebih awal ke triwulan IV 2026 dan imbal hasil (*yield*) US Treasury diprakirakan meningkat didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS.

Prospek ekonomi domestik tetap baik ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang terus diperkuat. Implementasi berbagai program prioritas Pemerintah untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik akan terus dioptimalkan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap sehat dan terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan kinerja transaksi berjalan 2026 tetap sehat dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB.

Penguatan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditempuh untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia melalui berbagai langkah untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Prospek inflasi IHK tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Sinergi dengan Pemerintah ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dengan memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (*El Nino*) terhadap harga pangan.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit *(lending appetite)* juga masih longgar serta didukung pertumbuhan DPK yang tetap tinggi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, antara lain melalui penguatan KLM untuk mendukung pendalaman pasar uang, serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) yang telah dimanfaatkan oleh bank sejak 1 Juli 2026 untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memperoleh pendanaan guna terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk menjaga kecukupan likuiditas dan memitigasi segmentasi likuiditas antarbank, serta mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.

BAB 3

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,75% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah (*"pro-stability"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*"pro-growth"*).

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, dengan:
   i. mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik;
   ii. mengelola struktur suku bunga di pasar uang yang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter *pro-market*;
   iii. menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% (*double digit*) sesuai dengan ekspansi moneter.

2. Memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman PUVA, dengan:
   i. kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portofolio asing berupa: (a) kenaikan insentif bagi *Swap* Jual Lindung Nilai (*Swap* Beli Lindung Nilai kepada BI) dari 10% menjadi sebesar 12,5% dan (b) perluasan insentif bagi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 15%;
   ii. pemberian insentif untuk meningkatkan *Local Currency Transaction* (LCT) dengan negara mitra[2] untuk diversifikasi transaksi valas berupa: (a) penambahan premi *Swap* Beli Lindung Nilai (*Swap* Jual Lindung Nilai kepada BI) sebesar 10%, dan (b) pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%.

3. Meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang sebagai berikut:
   i. perluasan *underlying* transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan/atau Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PASBI) dengan menambah obligasi dan/atau sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kedua surat berharga tersebut memenuhi persyaratan obligasi dan/atau sukuk korporasi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah, sejalan dengan BPPU 2030. Kebijakan ini akan dimulai selambat-lambatnya pada akhir September 2026;
   ii. penyempurnaan KLM untuk ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas, dengan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, melalui:
      a. peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima oleh bank menjadi paling tinggi sebesar 6,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya sebesar 5,5% dari DPK;
      b. penyesuaian alokasi KLM untuk *financing channel* bagi penyaluran kredit/pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas sebelumnya paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK menjadi paling tinggi 4,0% dari DPK;
      c. penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang, berupa KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2,0% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan Bank Indonesia. KLM PPU dimaksud menggantikan KLM *interest rate channel* dan *financing to funding channel*; serta
      d. penyempurnaan KLM tersebut akan berlaku efektif sejak 1 September 2026.

4. Memperkuat Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang meliputi 3 (tiga) modalitas yaitu:
   i. perluasan cakupan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan termasuk kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha untuk mendukung sektor yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
   ii. perluasan cakupan mekanisme kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank

[2] Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan 6 negara mitra, yakni Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

umum melalui skema *channeling* dan *executing;*

iii. penguatan mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak;

iv. penguatan Kebijakan RPIM akan berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026.

5. Memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran melalui:
   i. perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran serta perluasan kerja sama QRIS Antarnegara ke negara mitra prioritas;
   ii. penguatan inovasi dan kewirausahaan melalui intensifikasi *business matching* pada Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) Digdaya dan Hackathon untuk pengembangan talenta digital nasional;
   iii. penguatan implementasi penataan struktur industri melalui pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama yang memenuhi aspek manajemen risiko dan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah. Sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit/pembiayaan perbankan dilakukan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Ketidakpastian global kembali meningkat pasca re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026.

Pertumbuhan PDB Dunia

Negara	2022	2023	2024	2025	2026*
Dunia	**3,5**	**3,3**	**3,3**	**3,4**	**3,0**
Negara Maju	**2,6**	**1,7**	**1,8**	**1,9**	**1,7**
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,9	1,4	0,7
Jepang	1,0	1,5	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	**4,1**	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**3,9**
Tiongkok	3,0	5,2	5,0	5,0	4,6
India	6,8	7,7	6,5	7,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,6	4,5	4,1
Amerika Latin	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,3	3,4	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	5,4	2,0	2,4	3,6	2,2

Sumber: IMF WEO. *Proyeksi Bank Indonesia

PMI Global

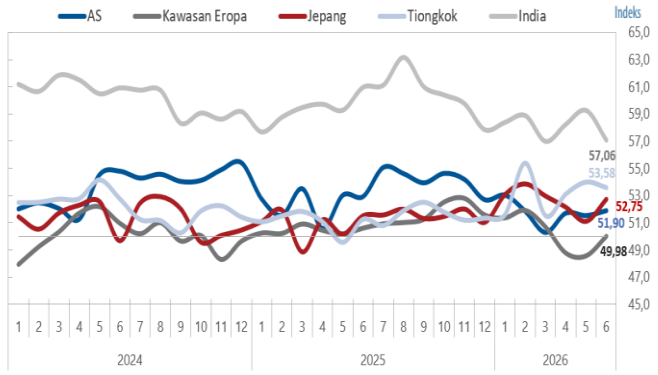

Sumber: IHS Markit, Bloomberg (Tiongkok)

Indeks Keyakinan Konsumen

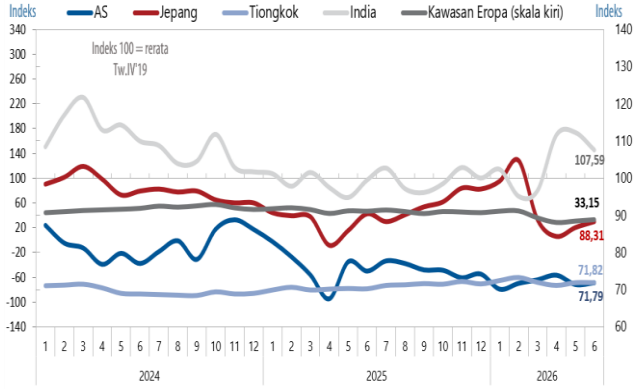

Sumber: Bloomberg, diolah

Penjualan Eceran Global

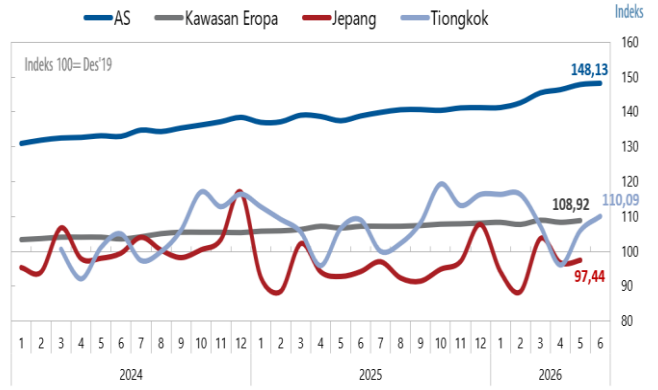

Sumber: CEIC, diolah

Inflasi Global

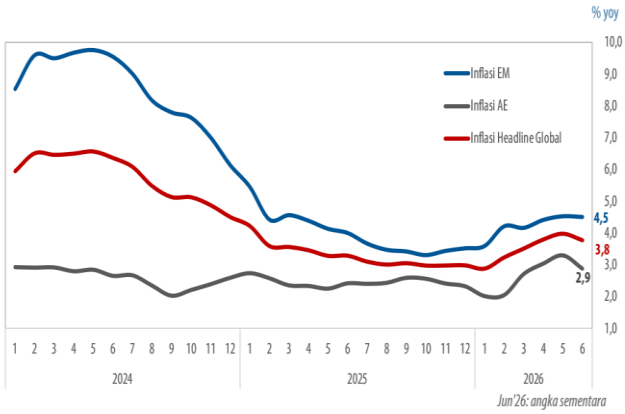

Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Harga Komoditas Ekspor Indonesia

KOMODITAS	2024					2025					2026		
	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	Q1	Q2*	Q3*	YTD*
Tembaga	-4,7	16,8	11,2	12,8	8,8	10,3	-4,3	5,6	19,2	7,5	36,7	41,6	36,4	32,2
Batu Bara	-27,7	-16,3	0,2	-11,3	-15,3	-14,4	-16,8	-20,2	-11,5	-15,7	5,2	38,1	49,8	26,5
CPO	0,5	6,2	5,2	31,3	10,5	17,1	0,3	6,9	-14,0	1,7	-10,7	11,2	5,4	1,7
Karet	17,9	44,3	40,6	40,0	35,3	9,3	-9,2	-7,6	-14,6	-6,0	-0,3	32,9	32,0	21,2
Nikel	-35,7	-16,9	-19,9	-7,2	-21,3	-6,2	-17,7	-7,8	-7,1	-10,0	11,1	19,1	9,2	15,7
Timah	0,2	25,3	18,5	23,4	16,7	21,0	0,5	7,0	24,8	12,8	52,2	60,6	55,3	48,3
Aluminium	-8,2	12,3	10,0	16,9	7,4	17,1	-3,9	8,1	9,3	7,4	21,8	42,8	19,9	26,3
Kopi	7,1	19,9	55,9	65,7	36,4	100,7	63,9	36,9	31,0	54,1	-16,7	-24,5	-2,7	-19,9
Lainnya	-1,0	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	1,1	1,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,8	0,5
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	**-8,2**	**1,7**	**6,1**	**8,7**	**1,5**	**2,9**	**-5,0**	**-3,5**	**-4,9**	**-2,9**	**3,4**	**20,9**	**22,2**	**13,5**
Minyak (Brent)**	83	85	80	75	81	76	68	69	64	69	81	104	77	91

**Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (%, yoy)
Sumber: Bloomberg. Data s.d. 20 Juli 2026

Indeks Ketidakpastian Global

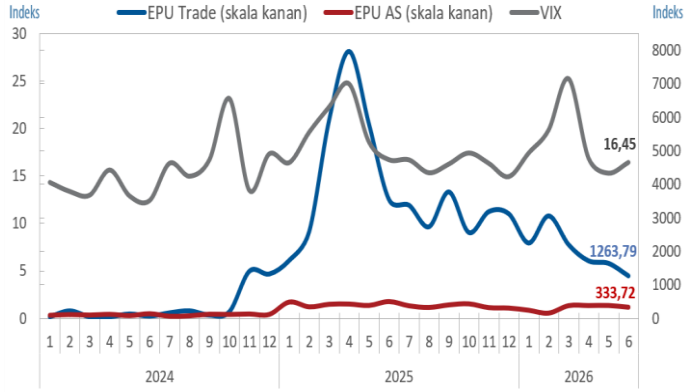

Sumber: Bloomberg, diolah

Yield UST 10Y dan JGB 10Y serta Indeks Saham AS

Sumber: Bloomberg. Data s.d. 20 Juli 2026

Kinerja Dolar AS dan Persepsi Risiko Negara Berkembang

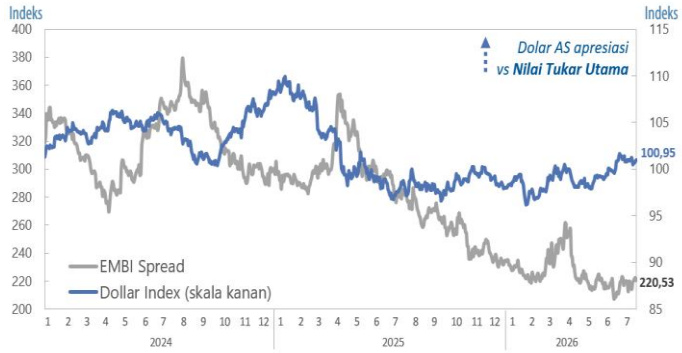

Sumber: Bloomberg. Data s.d. 20 Juli 2026

Aliran Modal ke Negara Berkembang

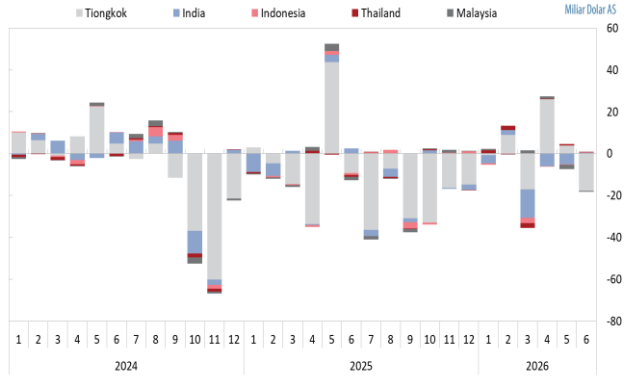

Sumber: IIF, diolah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik ditopang oleh permintaan domestik.

Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran

Komponen	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	5,0	4,9	5,1	5,0	5,5
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	24,1	9,8	11,5	6,1	12,5	3,1	7,8	3,8	5,9	5,1	6,3
Konsumsi Pemerintah	20,5	2,0	4,6	4,6	6,8	-1,2	-0,3	5,7	4,5	2,5	21,8
Investasi (PMTDB)	3,8	4,4	5,2	5,0	4,6	2,1	7,0	5,0	6,1	5,1	6,0
Investasi Bangunan	5,5	5,3	6,0	5,3	5,5	1,4	4,9	3,0	3,7	3,3	5,3
Investasi Nonbangunan	-0,8	2,0	3,0	4,4	2,2	4,3	12,9	10,3	12,4	10,1	7,8
Ekspor	2,0	8,9	9,7	8,4	7,3	5,9	10,1	9,1	3,3	7,0	0,9
Impor	1,9	8,1	12,6	11,3	8,5	3,6	11,1	0,9	4,0	4,8	7,2
PDB	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	4,9	5,1	5,0	5,4	5,1	5,6

Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha

Komponen	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.5	3.2	1.7	0.7	0.7	10.5	1.7	4.9	5.1	5.3	5.0
Pertambangan dan Penggalian	9.3	3.2	3.5	4.0	4.9	-1.2	2.0	-2.0	-1.3	-0.7	-2.1
Industri Pengolahan	4.1	3.9	4.7	4.9	4.4	4.5	5.7	5.5	5.4	5.3	5.0
Pengadaan Listrik dan Gas	5.3	5.4	5.0	3.4	4.8	5.1	0.9	2.9	3.6	3.1	-1.0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.4	0.8	0.0	1.1	1.6	0.2	0.8	3.3	-0.5	0.9	0.4
Konstruksi	7.6	7.3	7.5	5.8	7.0	2.2	5.0	4.2	3.9	3.8	5.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.6	4.9	4.8	5.2	4.9	5.0	5.4	5.5	6.1	5.5	6.3
Transportasi dan Pergudangan	8.7	9.6	8.6	7.9	8.7	9.0	8.5	8.6	9.0	8.8	8.0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.3	10.0	8.2	6.5	8.5	5.7	8.2	8.5	7.1	7.4	13.1
Informasi dan Komunikasi	8.4	7.7	6.8	7.5	7.6	7.7	7.9	9.6	8.1	8.3	7.1
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.9	7.9	5.5	1.7	4.7	4.0	3.2	0.8	7.9	4.0	4.7
Real Estat	2.5	2.2	2.3	3.0	2.5	2.9	3.7	4.0	3.7	3.6	3.5
Jasa Perusahaan	9.6	8.0	7.9	8.1	8.4	9.3	9.3	9.9	7.9	9.1	4.9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.9	2.9	4.0	1.2	6.4	4.8	4.7	4.3	1.6	3.9	6.5
Jasa Pendidikan	7.4	2.5	2.6	2.9	3.8	5.0	1.4	10.6	3.4	5.0	5.2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.7	8.6	7.7	5.2	8.1	5.8	3.8	6.8	5.9	5.6	7.6
Jasa lainnya	8.9	8.9	9.9	11.4	9.8	9.8	11.3	9.9	8.7	9.9	9.9
PDB	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	5.1	5.0	5.4	5.1	5.6

Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan I 2026

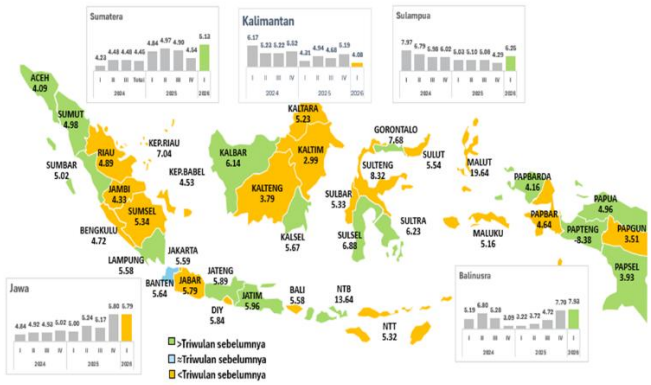

Sumber: BPS, diolah

Indeks Keyakinan Konsumen

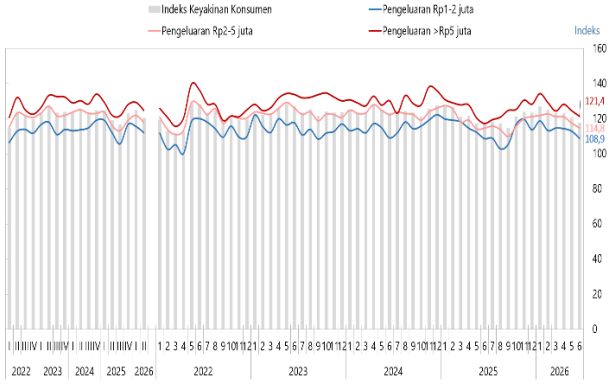

Sumber: Bank Indonesia

Nilai Tukar Petani

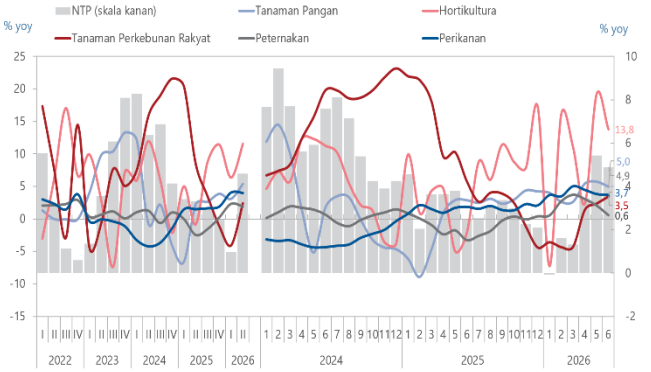

Sumber: BPS, diolah

Penjualan Eceran

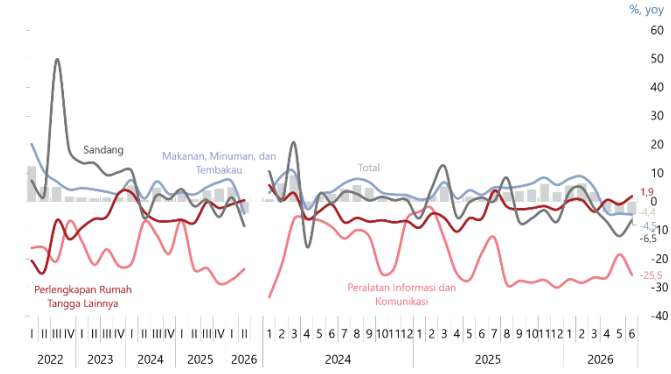

Sumber: Bank Indonesia

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

RINCIAN	2024		2025		2026	
	APBN (Rp Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2024 (Rp.Triliun)	APBN (Rp Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2025 (Rp.Triliun)	APBN (Rp Triliun)	Realisasi s.d. Juni 2026 (Rp.Triliun)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.463,0**	**2.842,5**	**3.005,1**	**2.756,3**	**3.153,6**	**1.459,4**
I. Penerimaan Dalam Negeri	**2.462,6**	**2.812,2**	**3.004,5**	**2.752,0**	**3.152,9**	**1.458,7**
1. Penerimaan Perpajakan	**2.021,2**	**2.232,6**	**2.490,9**	**2.217,9**	**2.693,7**	**1.187,8**
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**441,4**	**579,5**	**513,6**	**534,1**	**459,2**	**271,0**
II. Hibah	**0,4**	**30,3**	**0,6**	**4,3**	**0,7**	**0,7**
B. Belanja Negara	**3.061,2**	**3.350,3**	**3.621,3**	**3.451,4**	**3.842,7**	**1.656,0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.246,5**	**2.486,8**	**2.701,4**	**2.602,3**	**3.149,7**	**1.298,6**
1. Belanja Pegawai	442,6	464,5	521,5	501,1	580,7	321,2
2. Belanja Barang	387,0	493,3	486,9	546,9	714,1	267,9
3. Belanja Modal	199,1	328,1	234,1	427,5	279,1	109,4
4. Pembayaran Kewajiban Utang	441,4	488,4	552,9	514,4	599,4	281,6
5. Subsidi	298,5	291,9	307,9	281,6	318,9	116,0
6. Belanja Hibah	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	(0,0)
7. Bantuan Sosial	148,6	153,1	140,1	186,6	167,4	78,3
8. Belanja Lainnya	329,3	267,3	458,0	143,9	489,8	124,2
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**814,7**	**863,5**	**919,9**	**849,0**	**693,0**	**357,4**
1. Transfer ke Daerah	744,7	792,6	848,9	589,9	632,4	341,3
2. Dana Desa	70,0	70,9	71,0	55,0	60,6	16,1
C. Keseimbangan Primer	**(156,8)**	**(19,4)**	**(63,3)**	**(180,7)**	**(89,7)**	**85,1**
D. Surplus/Defisit Anggaran	**(598,2)**	**(507,8)**	**(616,2)**	**(695,1)**	**(689,1)**	**(196,5)**
Surplus/Defisit Anggaran (%PDB)	**(2,8)**	**(2,3)**	**(2,5)**	**(2,9)**	**(2,7)**	**(0,8)**

Sumber: Kementerian Keuangan

PMI Manufaktur

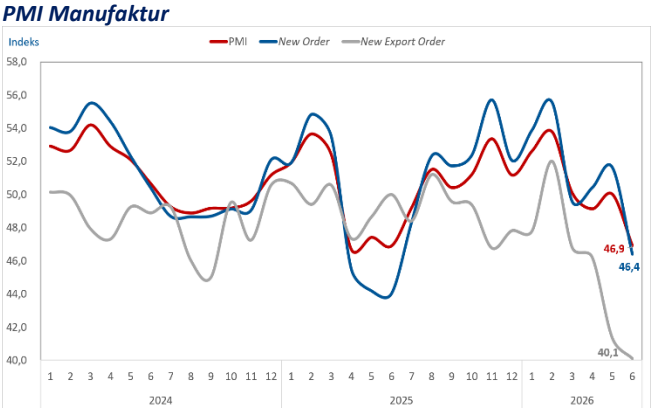

Sumber: Markit Economics, diolah

Ekspor Nonmigas

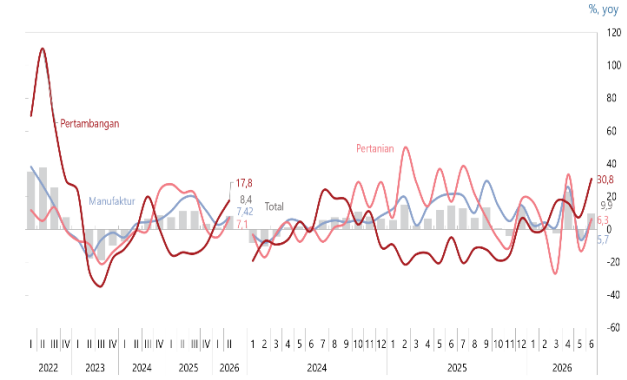

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia

Ekspor Nonmigas ke Negara Tujuan Utama

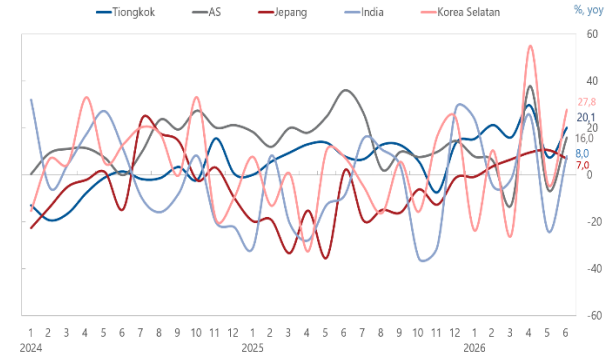

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia

Impor Nonmigas

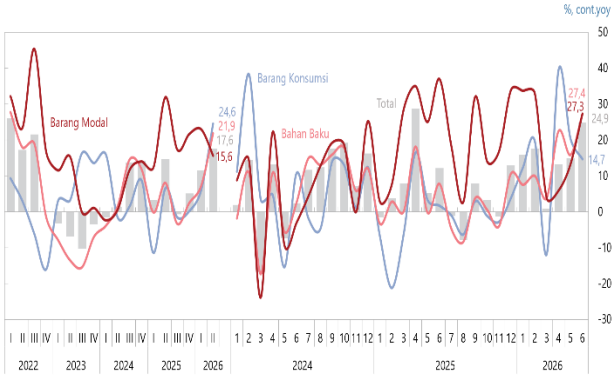

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia

Impor Barang Konstruksi

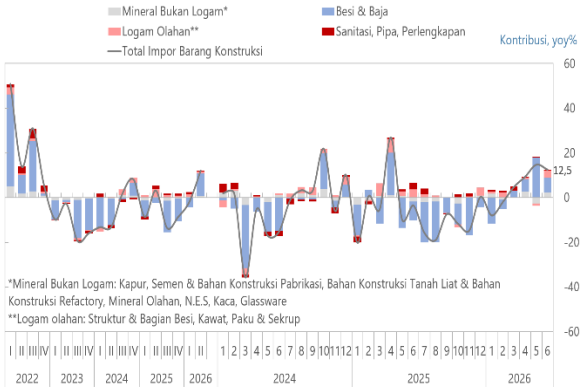

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi berbagai instrumen.

Neraca Pembayaran Indonesia

Komponen (Miliar Dolar AS)	2022					2023					2024					2025*					2026**
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total	I**
Transaksi Berjalan	**0,7**	**4,3**	**4,7**	**3,5**	**13,2**	**2,9**	**-2,3**	**-1,3**	**-1,4**	**-2,0**	**-2,4**	**-3,0**	**-2,0**	**-1,1**	**-8,6**	**-0,1**	**-2,9**	**4,0**	**-2,5**	**-1,5**	**-4,0**
A. Barang	11,3	16,8	17,6	17,0	62,7	14,8	10,0	10,2	11,4	46,3	9,3	10,0	9,2	11,3	39,8	13,1	10,5	16,0	10,2	49,9	8,0
- Ekspor, fob	66,8	75,2	77,8	72,8	292,5	66,8	61,6	63,5	65,9	257,7	61,9	62,3	67,5	71,3	263,1	65,9	68,0	73,9	72,6	280,4	66,4
- Impor, fob	-55,5	-58,4	-60,2	-55,8	-229,9	-52,1	-51,6	-53,3	-54,5	-211,4	-52,6	-52,3	-58,3	-60,0	-223,3	-52,9	-57,5	-57,9	-62,3	-230,6	-58,4
a. Non-migas	17,2	24,4	25,2	23,0	89,8	19,0	15,2	16,0	17,7	67,8	15,1	15,2	14,7	17,8	62,8	18,8	15,7	20,8	16,5	71,8	15,3
b. Migas	-5,7	-7,2	-8,5	-5,4	-24,8	-3,9	-4,7	-5,4	-5,9	-19,9	-5,5	-4,6	-4,4	-5,1	-19,6	-4,7	-4,2	-4,9	-5,7	-19,5	-5,3
B. Jasa-jasa	-4,3	-5,0	-5,3	-5,4	-20,0	-4,5	-4,5	-3,9	-4,8	-17,7	-4,2	-5,0	-4,2	-5,1	-18,5	-5,5	-5,3	-4,4	-5,3	-20,5	-4,6
C. Pendapatan Primer	-7,7	-9,0	-8,9	-9,6	-35,3	-8,8	-9,2	-8,8	-9,3	-36,0	-8,8	-9,5	-8,6	-9,0	-35,8	-9,3	-9,8	-9,4	-9,1	-37,6	-9,2
D. Pendapatan Sekunder	1,5	1,5	1,3	1,6	5,8	1,4	1,4	1,3	1,3	5,4	1,3	1,4	1,5	1,6	5,9	1,6	1,7	1,7	1,8	6,7	1,8
Transaksi Modal dan Finansial	**-2,0**	**-1,7**	**-5,6**	**0,6**	**-8,7**	**4,0**	**-4,4**	**-0,5**	**10,8**	**9,9**	**-2,4**	**2,6**	**8,1**	**9,6**	**18,0**	**-0,3**	**-4,2**	**-8,2**	**9,0**	**-3,7**	**-4,9**
1. Investasi Langsung	4,6	6,6	3,4	3,4	18,1	4,4	3,9	2,7	3,4	14,4	4,8	2,4	5,1	3,6	15,9	2,8	3,9	4,5	3,2	14,4	2,0
2. Investasi Portofolio	-3,2	-3,6	-3,1	-1,7	-11,6	3,0	-2,6	-3,0	4,9	2,2	-2,1	3,1	9,8	-2,5	8,2	1,0	-8,1	-7,1	4,7	-9,4	0,7
3. Investasi Lainnya	-3,5	-4,7	-5,9	-1,5	-15,6	-3,4	-5,7	-0,2	2,4	-6,8	-5,1	-2,9	-6,9	8,4	-6,4	-4,2	-0,1	-5,6	0,9	-9,0	-7,7
Neraca Keseluruhan	**-1,8**	**2,4**	**-1,3**	**4,7**	**4,0**	**6,5**	**-7,4**	**-1,5**	**8,6**	**6,3**	**-0,0**	**-0,6**	**5,9**	**7,9**	**7,2**	**-0,8**	**-6,7**	**-6,4**	**6,1**	**-7,8**	**-9,1**
Memorandum:																					
- Cadangan Devisa	**139,1**	**136,4**	**130,8**	**137,2**	**137,2**	**145,2**	**137,5**	**134,9**	**146,4**	**146,4**	**140,4**	**140,2**	**149,9**	**155,7**	**155,7**	**157,1**	**152,6**	**149,7**	**156,5**	**156,5**	**148,2**
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	7,0	6,4	5,7	5,9	5,9	6,2	6,0	6,0	6,5	6,5	6,2	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,2	6,0	6,2	6,2	5,8
- Transaksi Berjalan (% PDB)	**0,2**	**1,3**	**1,4**	**1,1**	**1,0**	**0,9**	**-0,7**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,2**	**-0,7**	**-0,9**	**-0,6**	**-0,3**	**-0,6**	**0,0**	**-0,8**	**1,1**	**-0,7**	**-0,1**	**-1,1**

Sumber: Bank Indonesia. *Angka sementara; **Angka sangat sementara

Neraca Perdagangan

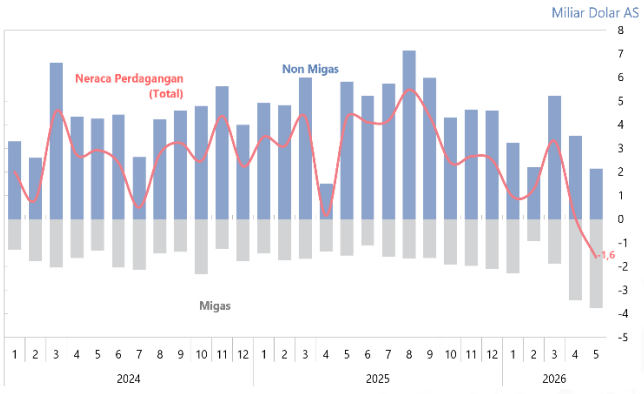

Sumber: BPS, diolah

I

Aliran Modal Asing

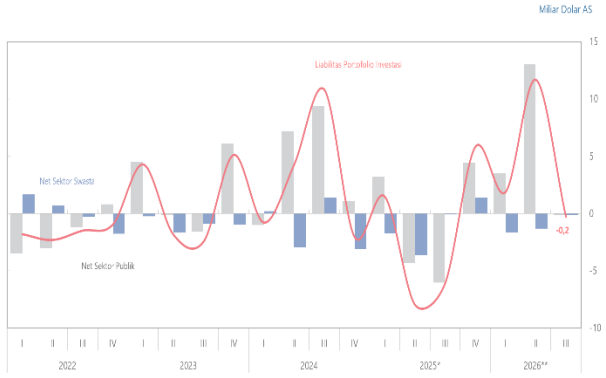

Sumber: Bank Indonesia. Data s.d. 20 Juli 2026 *Angka sementara **Angka sangat sementara

Cadangan Devisa

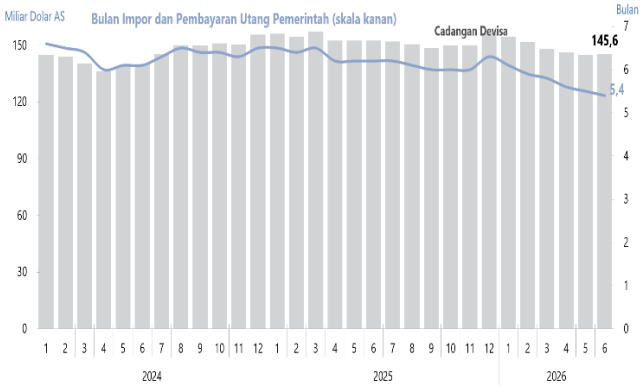

Sumber: Bank Indonesia

Indeks Rupiah terhadap USD, Negara Maju kecuali AS, dan Negara Berkembang

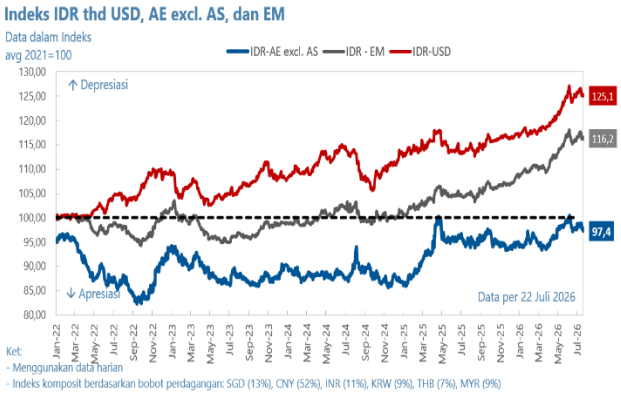

Sumber: Bloomberg. Data s.d. 22 Juli 2026

Suku Bunga Kebijakan Negara Kawasan

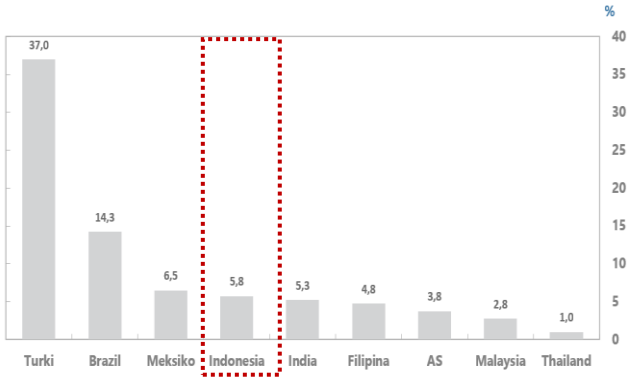

Sumber: Bloomberg. Data s.d. 21 Juli 2026

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Inflasi IHK dan Komponen

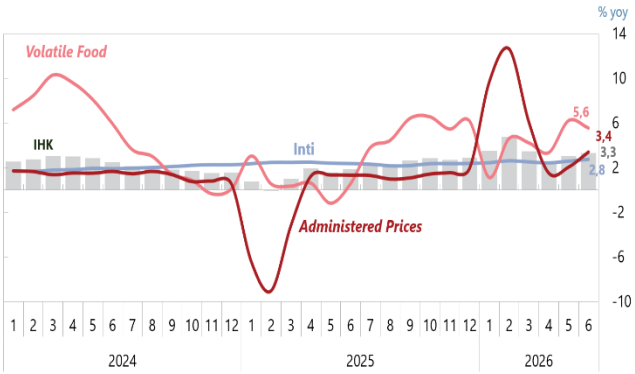

Sumber: BPS

Inflasi IHK Provinsi

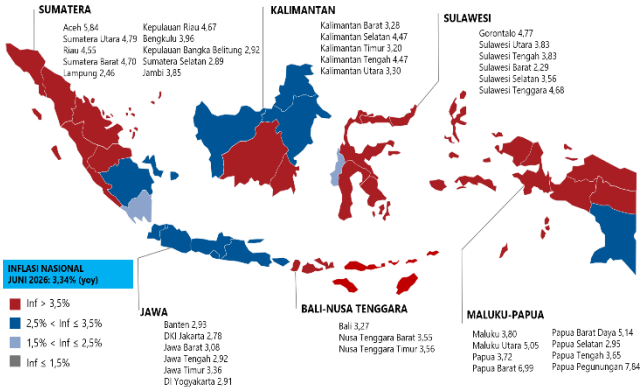

Sumber: BPS

Ekspektasi Inflasi

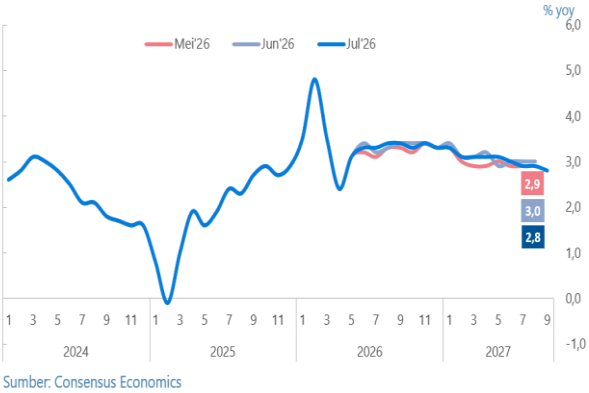

Sumber: *Consensus Economics*

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.

Perkembangan SRBI

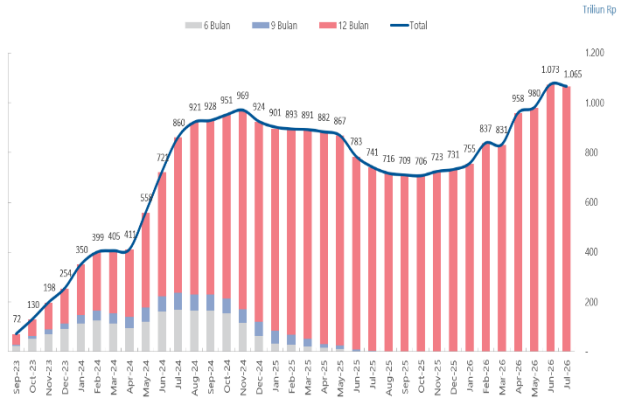

Sumber: Bank Indonesia. Data s.d. 21 Juli 2026

Perkembangan KLM

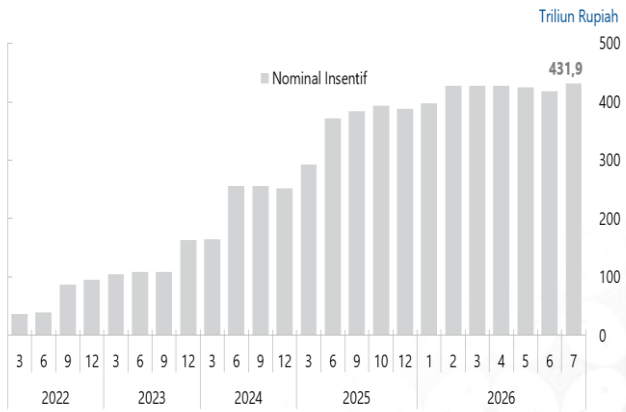

Sumber: Bank Indonesia

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi ketidakpastian global terhadap sistem keuangan.

Perkembangan Permodalan dan AL/DPK Perbankan

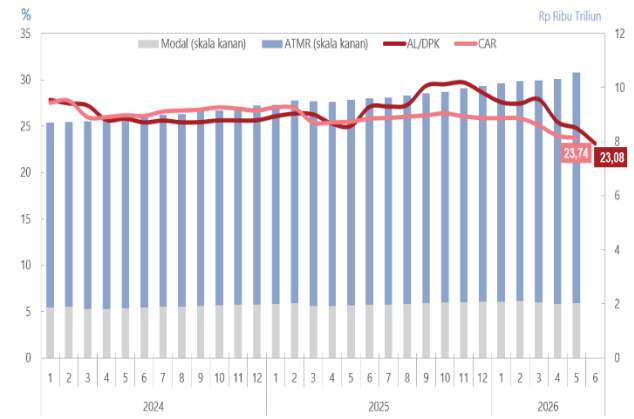

Sumber: Bank Indonesia

Likuiditas Perekonomian

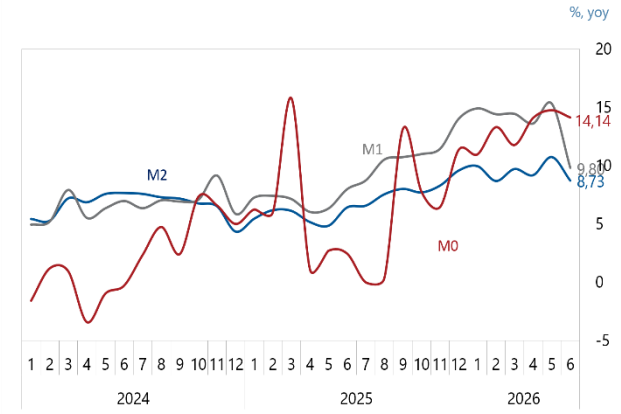

Sumber: Bank Indonesia

Komponen M0 dan M0 Adjusted

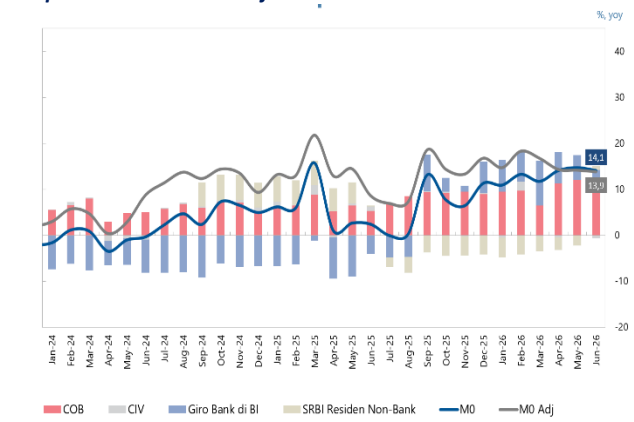

Sumber: Bank Indonesia

Faktor yang Memengaruhi M0 dan M0 Adjusted

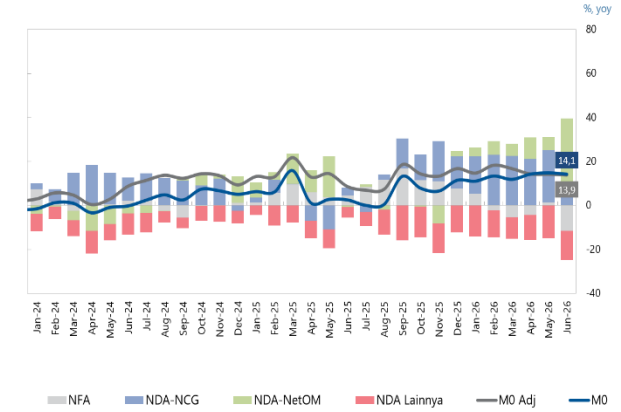

Sumber: Bank Indonesia

Komponen M2

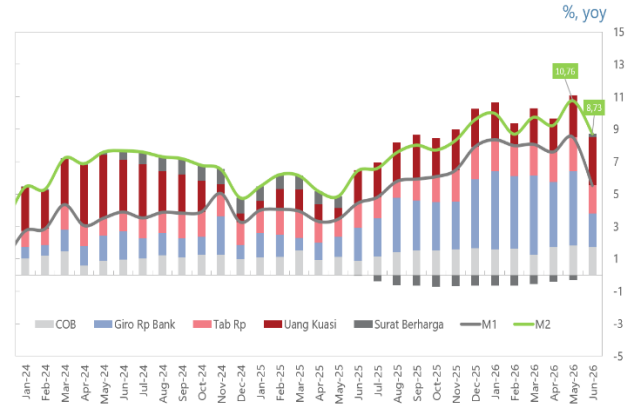

Sumber: Bank Indonesia

Faktor yang Memengaruhi M2

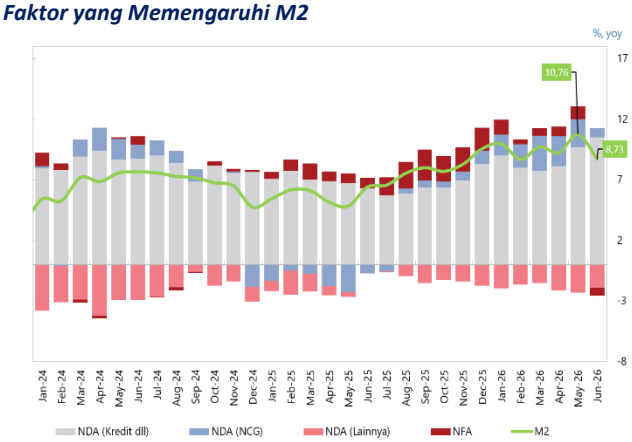

Sumber: Bank Indonesia

Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dan INDONIA

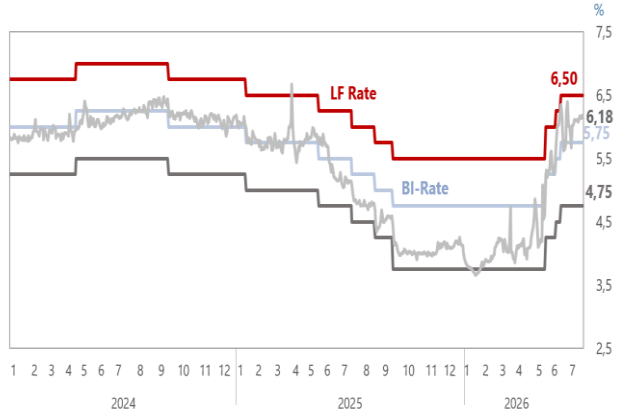

Sumber: Bank Indonesia, data s.d. 21 Juli 2026

Transmisi BI-Rate kepada SBDK

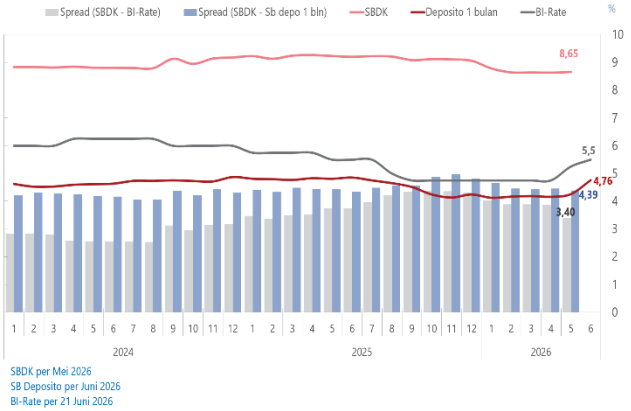

Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah

Suku Bunga Perbankan

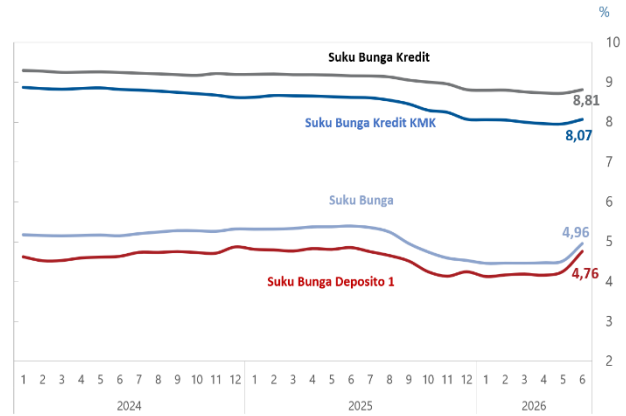

Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan Kredit dan DPK

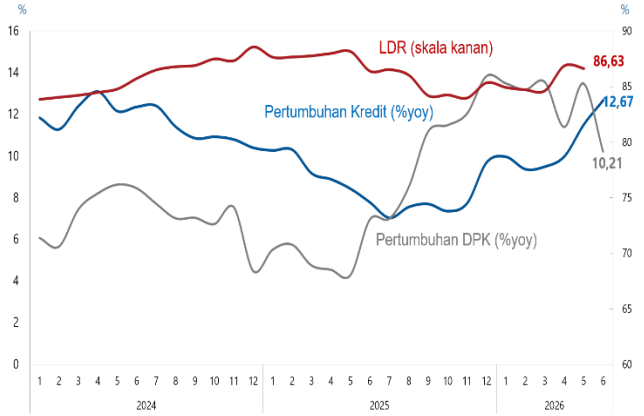

Sumber: Bank Indonesia

Yield SBN

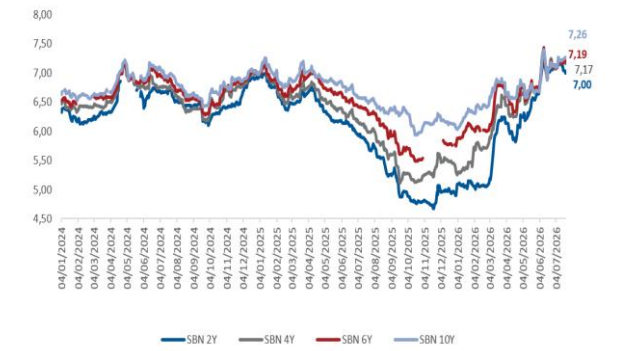

Sumber: Bank Indonesia, data s.d. 21 Juli 2026

Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

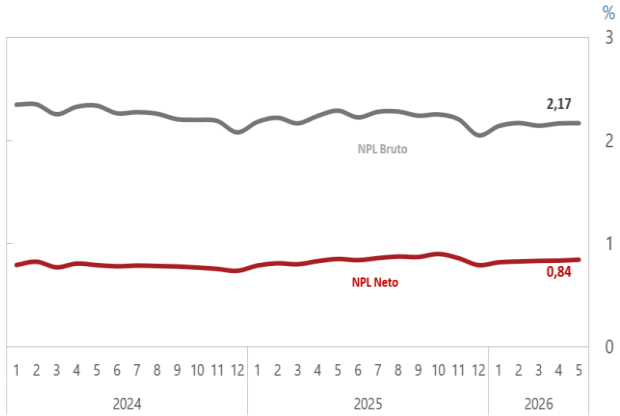

Sumber: Bank Indonesia, OJK

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Volume Transaksi Uang Elektronik

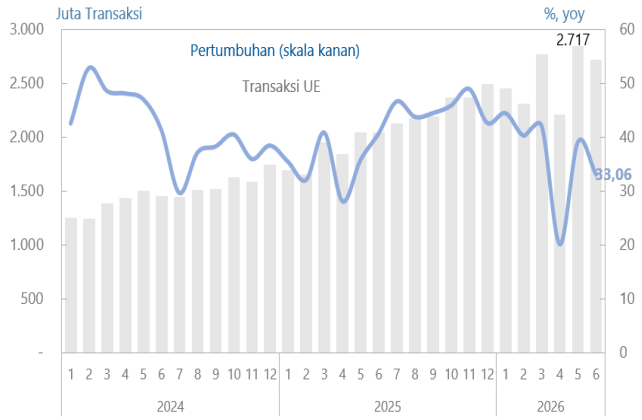

Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi Kartu Kredit

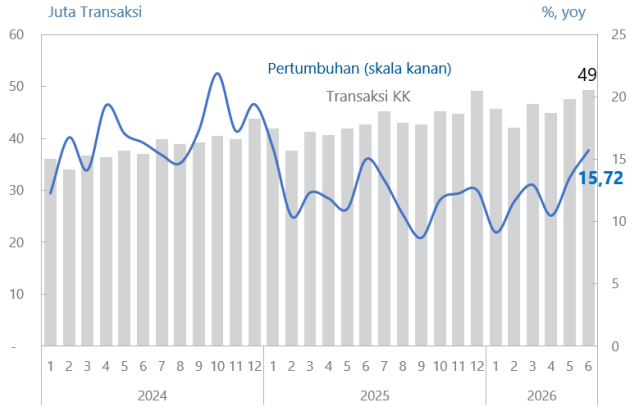

Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi Digital Banking

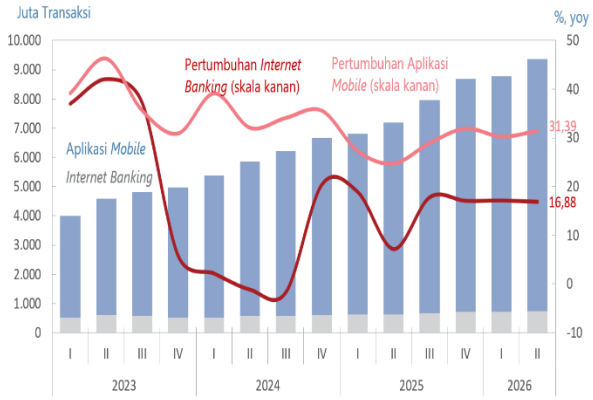

Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi QRIS

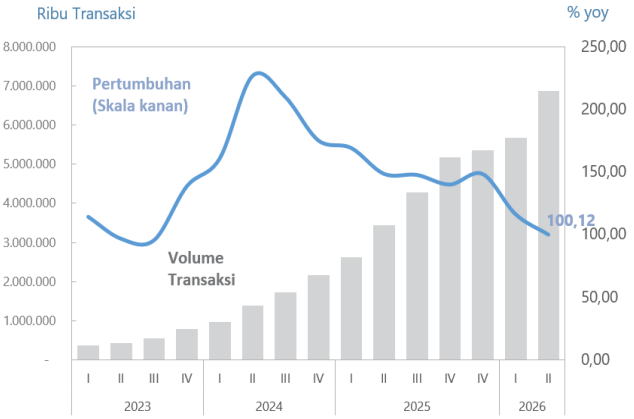

Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi BI-FAST dan BI-RTGS

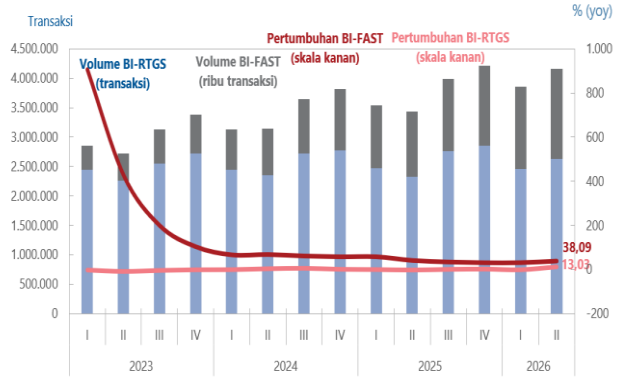

Sumber: Bank Indonesia

Uang Kartal yang Diedarkan

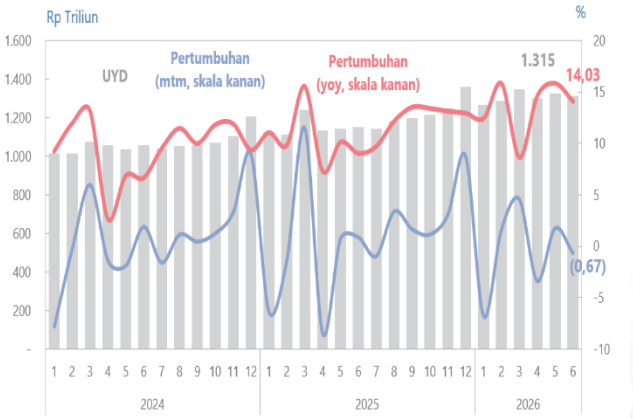

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diprakirakan dalam kisaran 4,9–5,7%.

Proyeksi PDB Indonesia

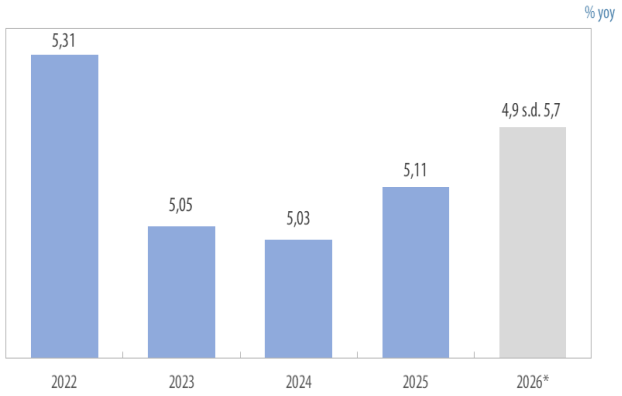

Sumber: Bank Indonesia. *Proyeksi Bank Indonesia

Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan

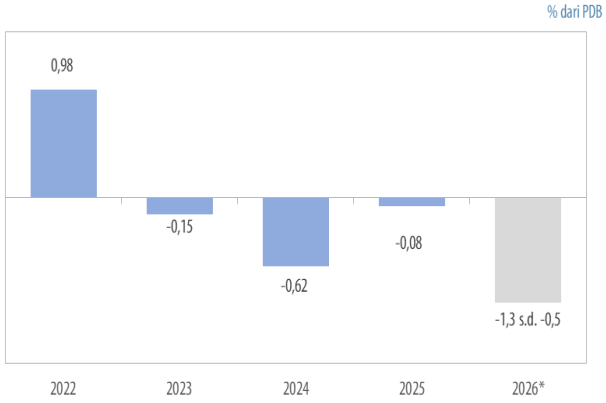

Sumber: Bank Indonesia. *Proyeksi Bank Indonesia

Proyeksi Pertumbuhan Kredit

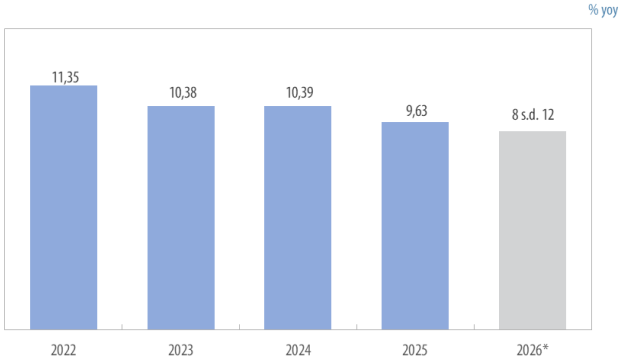

Sumber: Bank Indonesia. *Proyeksi Bank Indonesia

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Kelompok Komunikasi Kebijakan dan Pengaturan
Grup Perumusan Kebijakan
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Telp : Contact Center BICARA (+62 21) 131
Email : DKEM-KKP@bi.go.id
Website : https://www.bi.go.id